

## **Bab II**

### **Kerangka Pemikiran**

#### **2.1 Studi Terdahulu**

Dalam jurnal “*IMF dalam Fokus*” yang diorbitkan pada September 2006 Volume 35 oleh Laura Wallace menjelaskan bagaimana IMF dalam memajukan negara-negara yang berpenghasilan rendah seperti Vietnam, Kamboja, papuan Nugini, serta Bangladesh. Di negara Vietnam, IMF menerapkan liberalisasi perdagangan yang menjadi landasan kebijakan *doi moi* dimana sebelumnya negara ini merupakan turunan komunis, dengan menerapkan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan perekonomian negara ini ditambah lagi dalam kurun waktu 1993-2005 PDB Vietnam diatas 7,5% setahun, hal ini membuat 58% masyarakat Vietnam pada tahun 1993 menurun hingga 20% pada tahun 2004. Upaya IMF untuk liberalisasi perdagangan adalah penyederhanaan prosedur perizinan impor, penghapusan kuota secara bertahap, liberalisasi hak-hak perdagangan, dan pengurangan tarif.<sup>21</sup>

Bangladesh menghasilkan tekstil dan pakaian sebagai sumber devisa negara, mereka mengkhawatirkan apabila China masuk dan mengambil pasar Bangladesh. IMF kemudian memberikan pinjaman kepada Bangladesh sebesar \$78 juta sebagai dukungan finansial untuk mengatasi tekanan neraca pembayaran serta negara ini menerapkan kuota ekspor tekstil dan pakaian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Laura Wallace, “*IMF dalam Fokus Volume 35: Membuat Suatu Perubahan di Negara Asia yang Berpenghasilan Rendah*”, hal 3-5, diakses dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/ind/2006/090106i.pdf> pada 2 Mei 2017

<sup>22</sup> Ibid, hal 3-4

Papua Nugini merupakan salah satu negara berpenghasilan rendah, pada tahun 2000 negara ini mengalami masa sulit dimana kegiatan ekonomi dan dunia bisnis menurun, langkah yang dilakukan adalah pengembangan sistem keuangan, IMF mengembangkan peraturan dan pengawasan serta memberikan bantuan teknis kepada Bank Sentral. IMF merekomendasikan pemberian maksimum minimum, persyaratan pelaporan dan pengawasan yang lebih ketat, kerangka Internasional untuk menilai kecukupan modal, kualitas aktiva, pengelolaan, pendapatan, dan likuiditas bank. Dengan adanya bantuan dari IMF, Papua Nugini mampu untuk mengentaskan kredit macet dari 7,3 % pada tahun 2002 menjadi 3,6 % tahun 2005, serta laba aktiva yang merugi tahun 2002, naik menjadi 4 % pada tahun 2005.<sup>23</sup>

Negara lainnya adalah Kamboja dimana akibat dari peperangan sipil tahun 1991, porak poranda ini akhirnya harus adanya pembangunan kembali melalui rekonstruksi dan pelayanan publik. Sementara itu untuk mewujudkan langkah Pemerintah ini dibutuhkan dana, IMF masuk untuk memberikan bantuan teknis serta dukungan finansial, saran kebijakan. Pada awalnya negara ini mengalami permasalahan ekonomi sehingga pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara sebesar dua kali lipat. Atas saran dari IMF, tahun 1999 setelah Pemerintah memperkenalkan pertambahan 10 % pajak kepada seluruh masyarakatnya guna mengembalikan pendapatan negara kembali.<sup>24</sup> Pengeluaran Pemerintah juga diberikan ke sektor pertanian, pembangunan pedesaan, kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan terjadi pada peningkatan ekonomi-makro,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 4-5

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 5

pengentasan kemiskinan, pengelolaan pengeluaran publik pada bulan Januari 2006.<sup>25</sup>

Dari studi terdahulu ini kemudian penulis bisa menarik kesimpulan bahwa Indonesia yaitu isu yang sama dimana disini IMF juga tertuju kepada pembangunan kembali sektor ekonomi dengan mengurangi kendala-kendala negara dan sektor utama apa yang dibangun sebagai pendorong utama perekonomian.<sup>26</sup> Persamaan kasus dengan *Islamic Development Bank* (IDB) yang mencoba untuk memberikan dorongan kepada negara anggota seperti Indonesia melihat kendala negara adalah infrastruktur karena setiap pembangunan 1 % akan menyumbang 0,3 % PDB negara. Dalam bidang ekonomi seperti pembangunan infrastruktur ke daerah yang kurang akses publik sehingga terjadi pemerataan bahkan membantu mendorong UKM akan menggerakkan pemberdayaan masyarakat, keuangan syariah akan memberikan kontribusi bank-bank Indonesia dengan bunga yang minim, sehingga kendala bunga terlalu besar bisa diatasi.

Studi terdahulu selanjutnya adalah *Foreign Aid in the United States strategy in the XXI century* oleh Luiza Rodrigues<sup>27</sup> yang menjelaskan strategi bantuan luar negeri Amerika Serikat. Negara *superpower* ini sudah berkontribusi banyak dalam perkembangan bantuan luar negeri sejak berakhirnya perang dunia II, tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dan mendukung negara aliansi. Untuk abad ke-21 ini, Presiden Bush dan Obama melakukan aksi perlawanan terhadap aksi teror

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 5

<sup>26</sup> *Ibid*, "IMF dalam Fokus Volume 35: Membuat Suatu Perubahan di Negara Asia yang Berpenghasilan Rendah"

<sup>27</sup> Luiza Rodrigues, "Foreign Aid in the United States strategy in the XXI century", diakses dari <http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-ISA%20BuenosAires%202014/Archive/ee450a18-b23a-46a8-a5e2-93da2f58f7c5.pdf> pada 18 Mei 2017

yang terjadi pada tahun 2001, dengan pembangunan dan diplomasi pertahanan keamanan bersama sebagai pilar kepentingan nasional. Meningkatkan stabilitas dan mendorong negara untuk Pemerintahan yang baik agar dapat mencegah negara gagal. Selama ini basis teroris sendiri berasal dari negara-negara gagal dimana menentang Pemerintahan atau oposisi Pemerintah. Amerika Serikat juga aktif dalam bantuan bilateral dan multilateral terbukti dengan investasi ke *Worldbank* dan IMF. Studi terdahulu ini mencantumkan bahwa pandangan Carol Lancaster dalam bantuan luar negeri Amerika adalah untuk tujuan diplomatik dan pembangunan. Bantuan luar negeri ini diberikan secara luas pada penanganan isu global, lingkungan dan penyakit, pangan, reformasi dan demokrasi, pencegahan korupsi, konflik.<sup>28</sup>

Disini pandangan peneliti apabila Amerika lebih kepada tujuan diplomatik yaitu untuk menjaga keamanan internasional dunia, berbeda dengan IDB yang memprioritaskan tujuan *developmental* dimana pembangunan ekonomi negara anggota melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan mendorong keuangan syariah. Bantuan yang dikhususkan untuk memberikan kemapanan bagi umat muslim di dunia. Studi terdahulu ini bisa menjadi acuan bagi penulis untuk mengaplikasikan konsep.

---

<sup>28</sup> Luiza Rodrigues, "Foreign Aid in the United States strategy in the XXI century", diakses dari <http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-ISA%20BuenosAires%202014/Archive/ee450a18-b23a-46a8-a5e2-93da2f58f7c5.pdf> pada 18 Mei 2017

## 2.2 Kerangka Konseptual

### 2.2.1 Konsep Bantuan Luar Negeri

Menurut Hans Morgenthau dalam bukunya berjudul “*A political Theory of Foreign Aid*” menjelaskan<sup>29</sup>:

“...*real innovations which the modern age has introduced into the practice of foreign policy...*”

Salah satu inovasi dalam praktek kebijakan luar negeri. Asumsi bantuan luar negeri merupakan instrumen kebijakan luar negeri sebagai subjek yang kontroversi. *Foreign aid* merupakan kewajiban bagi negara kaya terhadap masyarakat miskin di dunia.

Sementara sama halnya dengan konsep *Foreign aid* atau lebih dikenal sebagai bantuan luar negeri yang dikemukakan oleh Carol Lancaster dalam buku *Foreign Aid: : Diplomacy, Development, Domestic Politics* , menjelaskan bahwa:

“*Foreign aid is among the “real innovations which the modern age has introduced into the practice of foreign policy”*<sup>30</sup>

“*Foreign aid is defined here as a voluntary transfer of public resources, from a government to another independent government, to an NGO, or to an international organization (such as the World Bank or the UN Development Program) with at least a 25 percent grant element, one goal of which is to better the human condition in the country receiving the aid*”<sup>31</sup>

Bantuan luar negeri merupakan praktek dari kebijakan luar negeri suatu negara. Definisi bantuan luar negeri adalah transfer sumberdaya negara donor ke negara lain, NGO, atau organisasi internasional seperti *Worldbank* secara sukarela, dengan syarat 25% dari bantuan adalah hibah dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat penerima bantuan. Bantuan luar negeri juga disebut sebagai alat

---

<sup>29</sup> Hans Morgenthau, “*A political Theory of Foreign Aid*”, *The American Political Science Review*, hal 301

<sup>30</sup> Carol Lancaster, “*Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*”, The University of Chicago Press, United State, 2007, hal 1

<sup>31</sup> *Ibid*, *Foreign Aid*: hal 9

diplomasi bagi negara kaya untuk mencapai kepentingannya dan diberikan kepada negara miskin, eksploitasi, atau cara negara-negara untuk bekerjasama dalam masalah global. Dalam buku Carol Lancaster ini lebih menekankan tujuan bantuan luar negeri adalah diplomatik, kemanusiaan, sosial-ekonomi, pembangunan, budaya, pembangunan demokrasi, penanganan masalah global, pengurangan konflik dan transisi paska konflik.<sup>32</sup>

Tren bantuan luar negeri memiliki sejarah yang panjang dengan motif yang selalu berkembang setiap periode. Pada awalnya, pemberian bantuan luar negeri sudah ada sejak sebelum tahun 1945 dimana negara koloni memberikan bantuan kepada negara terjajah atas penguasaan sumberdaya alam.<sup>33</sup> Terlebih bantuan akan memunculkan penilaian tersendiri, dimana negara donor mempertahankan pengaruhnya kepada negara penerima. Kemudian periode paska Perang Dunia II tahun 1945-1970, berkembang secara pesat dimana terjadi krisis besar-besaran di wilayah Eropa serta berdampak hancurnya ekonomi, menjadikan Amerika dan Uni Soviet menyebarkan pengaruhnya melalui pemberian bantuan luar negeri guna rekonstruksi ekonomi. Bukan hanya itu bahkan muncul organisasi Internasional seperti *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau sekarang lebih dikenal sebagai *World Bank*. Pada saat ini motif bantuan luar negeri lebih kepada politik dimana kedua negara ini memberikan bantuan untuk menambah aliansi. Pada tahun 1960 bukan hanya negara AS dan US, namun juga ada aktor baru yaitu negara penghasil minyak seperti Timur Tengah, Libya, Kuwait, dan Suriah dengan bantuan mengarah kepada Timur Tengah dan Afrika.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Maegan Hendow, "Lancaster: Foreign Aid", diakses dari <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/13786.pdf> pada 17 Mei 2017

<sup>33</sup> *Ibid*, *Foreign Aid*: hal 27-28

<sup>34</sup> *Ibid*, *Foreign Aid* : hal 28-33

Setelah itu pada tahun 1970-1990, akibat krisis minyak dan pangan membuat bantuan luar negeri melonjak tajam. Dari yang sebelumnya menyebarkan pengaruh menjadi ke arah bantuan pembangunan dan diplomatik. Banyaknya bermunculan NGO yang mengatur bantuan luar negeri sehingga dapat meminimalisir ketidakefektivan bantuan. Pada tahun 1970-1980, bantuan multilateral berkembang seperti *World Bank* dan *European Development Fund* (EDF) yang diberikan tanpa ada motif diplomatik, komersial, dan budaya dibandingkan dengan bantuan bilateral. Selama era ini juga mengembangkan pembangunan melalui liberalisasi perdagangan, pengurangan defisit, serta pemotongan pajak dan sukubunga yang rendah.<sup>35</sup>

Era 1990, adalah masa perubahan selama perkembangan trend bantuan luar negeri. Negara-negara donor memberi syarat lebih kepada negara penerima, sehingga menekan timbulnya penyelewengan. Syarat tersebut seperti demokrasi dan *good governance*. Ada beberapa cara untuk menjadikan bantuan luar negeri lebih efektif dari sebelumnya yaitu *result based management* yaitu melakukan pengawasan dana setiap periode. Kedua, *selectivity* adalah negara tujuan harus memenuhi syarat yang diajukan negara donor. Ketiga, *Sector Wide Assistance Programme* yaitu bantuan luar negeri harus sejalan dengan kebijakan dan program dalam negeri, sehingga bantuan ini bisa mendukung program negara penerima. Keempat, *Poverty Reduction Strategy Papers* yakni menjelaskan makroekonomi, struktural, dan kebijakan serta program mempromosikan dan mengurangi kemiskinan kepada lembaga donor.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid, Foreign Aid*: hal 33-44

<sup>36</sup> *Ibid, Foreign Aid*: hal 44-54

Dalam konsep ini juga menjelaskan bahwa terdapat 4 kategori yang dapat mempengaruhi bantuan luar negeri yaitu *ideas*, *interests*, *institutions*, dan *organisations*. *Ideas* adalah dimana bantuan luar negeri dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, ideologi negara donor. *Institutions* adalah mengenai peran, siapa yang menentukan agenda isu, siapa pembuat kebijakan, siapa yang memegang hak veto. Semua itu dapat dilihat dari bagaimana negara melakukan pemilihan langsung, sistem pemerintahan Presidensiil atau Parlemonter, dan peran legislatif, peran dari pemerintah lokal, dan dukungan dari NGO. *Interests* adalah dimana para kelompok kepentingan berperan dalam politik domestik. Ada 3 kategori penting dalam aspek ini yaitu mendukung tujuan komersial seperti agrikultur, manufaktur, dan produsen layanan untuk memperluas pasar ekspor negara donor. Kedua, yaitu keterlibatan NGO dan kelompok kepentingan publik dalam bantuan pembangunan maupun kemanusiaan untuk promosi aktivitas luar negeri seperti proteksi lingkungan dan keluarga berencana. Ketiga, kelompok yang mempunyai kesamaan etnis dan agama dengan negara penerima. *Organisations*, adalah bentuk kolaborasi antara Pemerintah dengan organisasi di luar pemerintah yang mendukung bantuan luar negeri.<sup>37</sup>

### 2.3 Definisi Konseptual

Dalam tulisan Maria Anderson yang berjudul “*Motive behind the Allocation of Aid*”<sup>38</sup> menjelaskan tentang motif bantuan luar negeri. Ada 6 motif bantuan luar negeri menurut Anderson yaitu *humanitarian*, *economical*, *strategic*, *ideology*, *identity*, *environment*. Motif kemanusiaan bertujuan untuk membantu korban akibat

---

<sup>37</sup> Log.cit, *Foreign Aid*, hal 18-22

<sup>38</sup> Maria Anderson, “*Motives behind the Allocation of Aid: A Case Regarding Swedish Motives for Aid Allocation*”, 2009



terjadinya perang dan kemiskinan di negara resipien. Ada 2 indikator dalam motif kemanusiaan yaitu *poverty reduction* dan *showing compassion*. *Poverty reduction*, merupakan upaya donor dalam memberikan bantuan luar negerinya yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memperbaiki kondisi.<sup>39</sup> Penting bagi donor untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari keterpurukan dan bebas, biasanya ini juga menjadi salah satu kebijakan penting dalam pemberian luar negeri. *Showing compassion*, negara donor menunjukkan rasa keprihatinan dan solidaritas atas korban perang maupun bencana. Sikap tanggung jawab kepada lainnya karena berada dalam dunia yang sama.<sup>40</sup>

Motif ekonomi, berbicara tentang perdagangan, dan mempromosikan bisnis serta memperluas ekspor melalui kerjasama negara, maka dari itu motif ini yang paling kuat melatarbelakangi pemberian bantuan luar negeri.<sup>41</sup> Motif kedua memiliki 3 indikator yaitu *trade*, *investment*, dan *export*. Indikator *trade*, berbicara tentang perdagangan internasional dan bagaimana membantu negara untuk menjangkau pasar internasional. Donor berusaha untuk membantu negara miskin atau resipien menjangkau pasar internasional, ini merupakan cara untuk keluar dari kemiskinan dan akan meningkatkan produktivitas negara resipien<sup>42</sup>. *Investment*, adalah cara bagi donor untuk meluaskan investasinya memberikan akses bagi perusahaan donor masuk ke negara resipien. Hal ini juga dapat menguntungkan kedua belah pihak, di negara resipien dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. *Export*, dimana untuk memperluas ekspor,

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 19

<sup>40</sup> *Ibid*, 2009, hal 18-20

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 15

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 20

bantuan luar negeri sebagai opsi untuk melancarkan aksinya dengan menciptakan pasar di negara resipien.<sup>43</sup>

Motif strategi, dengan membuka kedutaan akan memperkuat ikatan untuk kerjasama antar negara, motif ini untuk mencapai keamanan bersama terutama terhadap ancaman global terorisme.<sup>44</sup> Terdapat 4 indikator dalam motif strategi yaitu *bonding*, *embassies*, *security alliances*, serta *peace and security*. *Bonding*, atau bisa disebut ikatan, kedekatan hubungan antara negara donor dan resipien dengan adanya bantuan luar negeri, keinginan lebih dekat lagi.<sup>45</sup> *Embassies*, dengan jalur kedutaan akan mempermudah donor dalam mencapai kepentingannya serta bisnis luar negeri. Maka dari itu *embassies* adalah yang terpenting. *Security alliances*, bagaimana donor berpartisipasi dalam segala aliansi militer, pemberian bantuan luar negeri akan menambah aliansi keamanan donor. *Peace and Security*, keamanan dan perdamaian adalah salah satu agenda utama donor. Partisipasi dalam pencapaian ini seperti mengirim staf militer ke UN untuk kemudian mencapai misi *peacekeeping*.<sup>46</sup>

Motif Ideologi berbicara tentang *common politics* dan nilai suatu negara donor yang demokrasi, maka dari itu menyebarkan nilai negara donor kepada negara resipien. Terdapat 4 indikator yaitu *politics*, *values*, *democracy*, dan *human rights*. Indikator *politics*, kriteria negara resipien adalah harus demokrasi dan terbuka sama halnya dengan sistem politik donor. Negara donor tidak mau bekerjasama dengan negara yang masih otoriter dan membatasi masyarakatnya.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 21

<sup>44</sup> Maria Anderson, "Motives behind the Allocation of Aid: A Case Regarding Swedish Motives for Aid Allocation", 2009, hal 15

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 22

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 23-24

Sistem politik negara resipien menjadi salah satu acuan pertimbangan bantuan luar negeri. Indikator kedua adalah *values*, berbicara tentang bagaimana donor menyebarkan nilai-nilainya ke negara resipien. Nilai-nilai juga penting dalam keefektifan bantuan luar negeri seperti contohnya Hak Asasi Manusia dan anti korupsi yang akan mengurangi resiko gagalnya bantuan luar negeri.<sup>47</sup> Indikator ketiga *democracy*, negara yang demokrasi akan memberikan kebebasan bagi masyarakatnya sehingga jarang terjadi peperangan atas kepemimpinan yang berlaku. Nilai ini penting untuk dipertimbangkan dalam pemberian bantuan karena berkaitan pada keefektifan bantuan luar negeri. Indikator keempat, *Human Rights* dimana penting untuk donor mendukung HAM sehingga dapat memberikan kehidupan bebas dan kesetaraan kepada warga dan memiliki hak sama di resipien.<sup>48</sup>

Motif identitas, peran dan reputasi negara donor dalam arena internasional.<sup>49</sup> Ada 3 indikator yaitu *experience and knowledge*, *political aims*, dan *international recognition*. *Experience and knowledge*, bisa dilihat dari pengalaman donor selama memberikan bantuannya di berbagai wilayah yang berbeda, dengan ini akan mengetahui identitas donor tentang kriteria-kriterian di negara resipien. *Political aims*, indikator ini mencerminkan kebijakan luar negeri donor.<sup>50</sup> *International recognition*, berbicara tentang bagaimana peran donor dalam masyarakat internasional, dan bagaimana mereka mengenal dan merasakan peran donor sendiri dalam dunia internasional, kemudian inilah yang menjadi pembeda diantara donor lainnya.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 25-26

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 25-28

<sup>49</sup> *Ibid*, 2009, hal 14-16

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 28-30

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 30

Motif lingkungan, membantu negara miskin mengatur kebijakan lingkungan berkelanjutan, bahkan membantu keluar dari bencana alam yang disebabkan oleh perubahan lingkungan.<sup>52</sup> Motif keenam memiliki 2 indikator, yaitu *aid for better environment* dan *international responsibility*. Motif lingkungan ini merupakan motif baru dan dibutuhkan tindakan dari seluruh dunia. *Aid for better environment*, bahwa bantuan luar negeri digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi emisi. Hal ini berkaitan dengan konsumsi dan produksi suatu negara, maka dari itu donor mencoba mengembangkan teknologi dan program untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan aktif dalam partisipasi upaya melindungi lingkungan.<sup>53</sup> Indikator kedua ada *international responsibility*, berbicara tentang tanggung jawab bersama. Negara kaya dikenal sebagai negara industri, maka dari itu mereka yang menyebabkan emisi berlebihan. Melalui bantuan luar negeri negara kaya wajib untuk bertanggung jawab dan membantu negara berkembang agar tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang dapat merusak, sementara kepemilikan lahan hijau sebagian besar ada pada negara berkembang, dengan tuntutan ekonomi akan menambah kerusakan lingkungan.<sup>54</sup>

## **2.4 Definisi Operasional**

Definisi Operasional, penulis akan menjelaskan fenomena dengan konsep yang digunakan oleh penulis. Penulis akan menggambarkan tujuan bantuan luar negeri *Islamic Development Bank (IDB)* melalui *Member Country Partnership Strategy (MCPS)* dengan menggunakan konsep bantuan luar negeri oleh Maria Anderson.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 16-17

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 31

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 32-33

#### **2.4.1 Motif Kemanusiaan**

Bantuan luar negeri digunakan untuk alasan kemanusiaan. Terdapat dua indikator yang dapat menjelaskan motif ini yaitu *reduction poverty* dan *showing compassion*. Program yang diberlakukan di Indonesia memuat pembangunan untuk memperbaiki perekonomian. Artinya indikator pertama dapat dioperasikan untuk analisis MCPS di Indonesia tahun 2011-2014. Kedua adalah bantuan ditujukan karena adanya rasa keprihatinan IDB terhadap Indonesia karena adanya gempa bumi maupun perang. Pada periode 2011-2014 Indonesia dalam keadaan stabil artinya tidak sedang terjadi perang maupun bencana alam. Maka dari itu indikator kedua tidak bisa dibuktikan.

#### **2.4.2 Motif Ekonomi**

Bantuan luar negeri ditujukan atas dasar motif ekonomi. Terdapat 3 indikator yang dapat menjelaskan motif ini yaitu perdagangan, investasi, dan ekspor. Indikator perdagangan, seperti yang kita ketahui salah satu peran IDB adalah memfasilitasi kegiatan perdagangan negara anggotanya terutama Indonesia. Perdagangan akan menguntungkan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas. Indikator ini dapat dipakai untuk menjelaskan bantuan luar negeri yang diberikan. Kedua adalah investasi, dalam program MCPS penulis tidak melihat adanya investasi. Apakah investasi IDB ke Indonesia mengalami kenaikan selama bantuan berjalan. Ketiga, bagaimana kegiatan ekspor Indonesia mengalami kenaikan, disamping itu juga melihat aktivitas ekspor antar negara anggota dan Indonesia sebelum dan sesudah adanya bantuan. Untuk indikator investasi tidak dapat dibuktikan, namun indikator ekspor bisa dijelaskan.

### **2.4.3 Motif Strategi**

Terdapat 4 indikator yang dapat menjelaskan motif strategi. Ikatan, sebelumnya IDB dan Indonesia memiliki kedekatan seperti apa, dengan adanya bantuan apakah hubungan keduanya semakin terikat. Kedua, adakah IDB membuka kedutaan atau kantor perwakilan di Indonesia. Ketiga, bantuan luar negeri IDB ke Indonesia ini untuk menambah aliansi keamanan dan menggagas kerjasama keamanan. Keempat, bantuan digunakan untuk menciptakan perdamaian di Indonesia. Dalam motif strategi ini untuk indikator ikatan dan kedutaan merupakan motif yang dominan melatarbelakangi pemberian bantuan luar negeri. Namun untuk indikator ketiga dan keempat tidak dapat dibuktikan karena pemberian bantuan luar negeri diberikan oleh organisasi internasional, sehingga tidak bisa diaplikasikan pada isu ini.

### **2.4.4 Motif Ideologi**

Terdapat 4 indikator yang dapat memperjelas motif ideologi. Pertama *politics*, sistem politik yang harus terbuka dan demokrasi adalah syarat bagi negara Indonesia untuk menerima bantuan. Kedua *values*, IDB menyebarkan nilai-nilai seperti *human rights* dan anti-korupsi ke negara Indonesia. Ketiga demokrasi, bagaimana demokrasi di negara Indonesia, demokrasi menjadikan masyarakat hidup dengan kebebasan dalam melakukan tindakan apapun tanpa ada tekanan dari Pemerintah dan menekan timbulnya aksi pemberontakan. Keempat *human rights*, dimana IDB mendukung penegakan HAM di Indonesia, dengan pedoman *equality* terhadap seluruh masyarakat. Motif ini merupakan syarat bagi negara resipien untuk mendapatkan bantuan luar negeri. Indonesia sendiri merupakan negara dengan sistem politik terbuka, demokrasi dan menerapkan nilai HAM, maka dari itu motif

ideologi ini masuk untuk mendapatkan bantuan luar negeri, namun tidak dapat dianalisis karena seperti keterangan penulis sebelumnya bahwa bantuan ini diberikan oleh IDB yang merupakan organisasi internasional.

#### **2.4.5 Motif Identitas**

Terdapat 3 indikator yang dapat menjelaskan motif identitas. Pertama, pengalaman dan pengetahuan, melihat pengalaman IDB selama memberikan bantuan dan apa yang menjadi pembeda dengan organisasi lainnya. Kedua, *political aims* bisa dilihat dari arah kebijakan luar negeri negara donor, karena penulis membahas organisasi internasional sehingga tujuan politik ini tidak bisa dijelaskan. Ketiga, pengakuan internasional, dapat dilihat dari visi dan misi IDB membentuk citranya di dunia internasional. Motif ini juga menjadi salah satu alasan dominan dalam pemberian bantuan luar negeri IDB, karena identitas IDB dikenal sebagai bank dari OKI yang hanya memberikan bantuan luar negeri kepada masyarakat islam di dunia sehingga inilah yang membedakan organisasi ini dengan lainnya.

#### **2.4.6 Motif Lingkungan**

Terdapat 2 indikator yang digunakan untuk menjelaskan motif lingkungan ini. Pertama *Aid for better environment*, bantuan digunakan IDB untuk membantu Indonesia keluar dari masalah lingkungan terutama eksploitasi berlebihan untuk aktivitas ekonomi. Kedua *International responsibility*, bantuan yang diberikan IDB ke Indonesia untuk menunjukkan sikap tanggung jawab atas persoalan lingkungan. Dari motif ini, penulis tidak menemukan salah satu tujuan MCPS adalah untuk isu lingkungan. Maka dari itu seluruh indikator dalam motif ini tidak dapat dijelaskan dalam isu ini.

## 2.5 Operasionalisasi Konsep

**Tabel 1: Konsep Bantuan Luar Negeri**

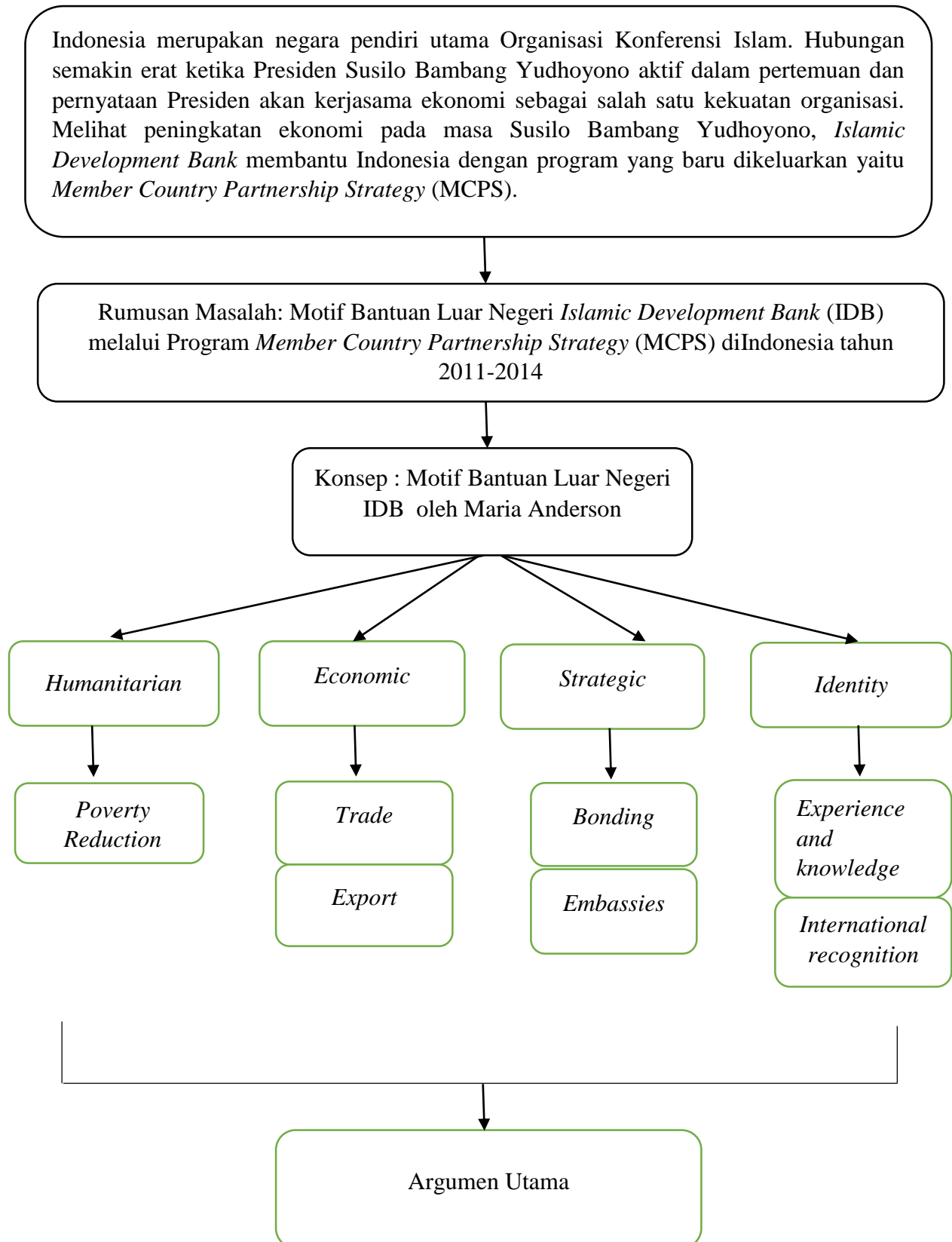
Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Motive allocation of aid</i>	<i>Humanitarian</i>	<i>Poverty</i>	Adanya bantuan
		<i>Reduction</i>	bersifat pembangunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan
	<i>Economic</i>	<i>Trade</i>	Adanya peningkatan volume perdagangan donor ke resipien
		<i>Export</i>	Adanya peningkatan ekspor donor ke resipien untuk perluasan pasar
	<i>Strategic</i>	<i>Bonding</i>	Adanya bantuan luar negeri untuk membentuk ikatan hubungan kerjasama
		<i>Embassies</i>	Adanya pembukaan kedutaan maupun kantor perwakilan di negara resipien



	<i>Identity</i>	<i>Experience and knowledge</i>	Adanya tranfer pengetahuan dan sumberdaya unggul yang melekat sebagai identitas donor di negara resipien
		<i>International recognition</i>	Adanya bantuan untuk menunjukkan peran donor dalam dunia internasional

Sumber: Maria Anderson, "*Motives behind the Allocation of Aid*", 2009

## 2.6 Alur Pemikiran



## **2.7 Argumen Utama**

Argumen utama penulis adalah OKI melalui Bank Pembangunan Islam memberikan bantuan dana yang diberikan dengan tujuan utama pembangunan guna mendorong perekonomian. IDB melihat potensi Indonesia yang besar akan pergerakan perekonomian di Indonesia yang pesat. MCPS ini diharap akan membantu meringankan Indonesia dalam tantangan dan kendala pertumbuhan ekonomi, serta membangun sistem pembiayaan Islam. Motif kemanusiaan, penulis melihat adanya indikator pengentasan kemiskinan di Indonesia karena pada dasarnya bantuan diarahkan untuk pembangunan maka dari itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang akan mengurangi kemiskinan. Motif ekonomi yakni untuk meningkatkan perdagangan dan ekspor. Motif strategi, yakni menjelaskan hubungan antara Indonesia dan IDB melalui indikator ikatan dan kedutaan. Motif keempat adalah identitas yang terdiri dari pengalaman dan pengetahuan serta pengakuan internasional, yang menjelaskan perbedaan IDB dengan organisasi multilateral lainnya di Indonesia.